BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. (Siti Kurnia Rahayu : 2009).

Pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dalam hal ini fungsi pajak sebagai fungsi budgetair sedangkan fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi adalah fungsi pajak *regulerend* (Siti Kurnia Rahayu : 2009)

Penerimaan Negara Indonesia sebagian besar berasal dari pajak, tetapi upaya mengumpulkan dana dari pajak bukan berarti harus semaksimal mungkin. tetapi hal ini bertentangan dengan hak warga Negara untuk tetap menjalankan kehidupan yang layak, dengan demikian maka jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas Negara benar-benar masuk semua. (Siti Kurnia Rahayu : 2009)

Terdapat faktor–faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga Negara yaitu sistem adminitrasi perpajakan yang tepat, pelayanan, kesadaran dan pemahaman warga Negara, serta kualitas petugas pajak. (Siti Kurnia Rahayu : 2009)

Penerimaan perpajakan telah mencapai lebih dari Rp. 800 T, namun bila dibandingkan dengan potensi pajak yang ada, maka perlu dilakukan langkah-langkah terobosan dibidang ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Penerimaan perpajakan dalam APBN-P 2011 ditargetkan Rp. 878,7 T yang merupakan 75,4% dari total penerimaan dalam negeri Rp. 1.165,3 T. Untuk orang pribadi, Pembayaran pajak yang dilaporkan melalui penyerahan SPT hanya berjumlah 8,5 juta padahal jumlah orang yang aktif bekerja di Indonesia berjumlah 110 juta (data BPS). Artinya, rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya mencapai 7,73%; dengan kata lain tingkat kepatuhan WP OP masih sangat rendah. Untuk badan usaha, Pembayaran pajak yang dilaporkan melalui penyerahan SPT hanya berjumlah 466 ribu sedangkan jumlah badan usaha yang berdomisili tetap dan aktif berjumlah sekitar 12,9 juta. Artinya, rasio SPT Badan terhadap jumlah badan usaha aktif hanya mencapai 3,6%; dengan kata lain tingkat kepatuhan WP Badan juga masih sangat rendah. (A.Fuad Rahmany : 2011).

Untuk penerimaan pajak pada KPP Bojonagara tiap tahunnya mengalami peningktan tetapi untuk tahun 2012 target penerimaan sebesar 678.437.898.774 hanya dapat terealisasi sebesar 639.794.940.264 hal ini bisa disebabkan karena kepatuhan WP dalam perpajakan mengalami penurunan pada tahun 2012 (Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Bojonagara Bandung)

"Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan itu, Pemerintah terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan, termasuk melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak. Dalam mengoptimalkan penggalian potensi perpajakan, pada bulan September 2011, Pemerintah berencana melakukan Sensus Pajak Nasional. Melalui kegiatan sensus itu, kita ingin cakupan potensi pajak terus meningkat, baik dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan. Dengan komitmen itu, dalam RAPBN 2012, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai 1.019,3 triliun rupiah, atau memberi kontribusi hampir 79 persen dari total pendapatan negara dan hibah." (Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2012 Beserta Nota Keuangan Tanggal 16 Agustus 2011).

Saat ini diketahui sedikit sekali Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Dari puluhan juta orang Indonesia yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hanya 8,5 juta yang melaporkan SPT-nya untuk tahun pajak 2010. Begitu pun dengan badan usaha. Dari belasan juta yang terdaftar, hanya 466 ribu yang baru melaporkan SPT atau membayar pajaknya. Menyadari masih sedikitnya jumlah pembayar pajak, maka pemerintah akan melaksanakan kegiatan yang dinamakan

Sensus Pajak Nasional. Dengan kegiatan ini diharapkan semua orang atau badan yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan benar, dapat melaksanakannya sesuai kondisi atau potensi yang sebenarnya (www.pajak.go.id)

Kegiatan Sensus Pajak Naional (SPN) dimulai tahun 2011, dengan wilayah sensus meliputi daerah PVJ, BTC dan Giant. Pelaksanaanya dilakukan dengan mendatangi langsung wajib pajak, melaksanakan wawancara dengan mengisi formulir isian sensus pajak (FIS), serta mengisi formulir pengamatan. " ungkap Bpk.Yono selaku Kepala Ektensifikasi KPP Bojonagara Bandung. (Senin,20 Mei 2013)

Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sensus pajak nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk perluasan basis pajak, peningkatkan penerimaan pajak, peningkatan penerimaan jumlah SPT tahunan Pph, Pemuktahiran data WP.

Sensus Pajak pada hakikatnya untuk menegakkan keadilan. Sungguh tidak adil apabila ada sebagian masyarakat yang telah membayar pajak tapi masih banyak lagi yang belum membayar pajak. Masyarakat haruslah memiliki rasa bangga ketika telah memenuhi kewajibannya membayar pajak. Melalui Sensus Pajak Nasional yang dilaksanakan pemerintah, diharapkan seluruh masyarakat bisa mewujudkan rasa bangga bayar pajak (www.pajak.go.id).

Sensus pajak yang di luncurkan akhir September 2011 lalu belum memenuhi target yang diharapkan. Pada pelaksanaannya dari Oktober hingga Desember 2011, dari target 4.400 responden ternyata yang dapat terrealisasi hanya sebanyak 3.200 sedangkan untuk tahun 2012 rencana target 15.000 responden dan dapat terrealisasi sebanyak 17.636. Kepala seksi ekstensifikasi bapak yono mengungkapkan, bahwa hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas sensus dilapangan. Berdasarkan petugas sensus yang terjun langsung ke lapangan, banyak sekali kendala yang dihadapi oleh mereka. Mulai dari wajib pajak yang tidak berada di lokasi hingga Resistensi dari calon responden cukup membuat mereka kesulitan. Faktor lainnya adalah masalah waktu, jumlah petugas dan kondisi cuaca yang kadang panas atau hujan hal ini menghambat kinerja petugas dalam melaksakan kegiatan sensus pajak nasional, ditambah lagi dengan wajib pajak tidak menyampaikan data secara akurat dan benar," padahal dari kondisi wajib pajak yang dilihat petugas,tidak seperti data yang diberikan wajib pajak." katanya, senin (20/5).

Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) menemui banyak kendala, termasuk adanya penolakan dari masyarakat, namun bagi masyarakat yang menolak sensus pajak tersebut, tidak langsung dikenai tindakan represif. "Kendala macam-macam, ada yang tidak menurut, tapi sebagian besar akomodatif, tapi ada yang tidak mau isi formulir, ada yang tidak mengerti, manusia kan macam-macam di dunia nyata, ada yang tidak mau bayar pajak," ujar Dirjen Pajak Fuad Rahmany saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (18/10). Untuk itu, jika ada masyarakat yang mangkir dari kewajiban

tersebut maka akan mendapatkan sanksi. Meskipun untuk awal, pihaknya akan melakukan himbauan terlebih dahulu (www.analisadaily.com).

Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai Negara dan sikap sadar terhadap fungsi Negara. sikap yang demikian merupakan kostelasi komponen kognitif dan efektif yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan dan berprilaku terhadap makna dan fungsi Negara atau siapapun yang merasa menjadi warga Negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan konstribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan membayar kewajiban pajaknya.(Suparmoko dan Irwan ,2005).

Berdasarkan uraian diatas yang telah peneliti jabarkan, maka penelitian ini diberi dengan judul **"Tinjauan Atas Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung".**

1.2 Identifikasi Masalah

Menetapkan masalah-masalah yang akan dianalisis terhadap suatu perusahaan. Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan yang rendah ditandai dengan banyak WP yang belum menyampaikan SPT
2. Pemberian informasi data wajib pajak yang tidak akurat dan benar yang dilakukan oleh waib pajak

3. Resistensi atau penolakan dari calon wajib pajak yang tidak mau ditemui ketika kegitan sensus pajak berlangsung

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tujuan kegiatan sensus pajak nasional pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung ?
2. Bagaimana hasil kegiatan sensus pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi petugas sensus pajak dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung ?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk meneliti bagaimana pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) dikantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikiut:

1. Utuk mengetahui tujuan Sensus Pajak Nasional (SPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.
2. Untuk mengetahui hasil sensus pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi petugas sensus pajak dalam Pelaksanaan sensus Pajak Nasional (SPN) Pada Kantor Pealayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam melakasanakan penelitian, penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayan Pajak Bojonagara yang berlokasi dijalan Terusan Prof.Dr Sutami Bandung,tlp : 022-22-4380, Fax : 022-200340

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu dimulai dari bulan maret-juni 2013

Tabel 1.1

Tabel Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	**Bulan**				
		Maret 2013	April 2013	Mei 2013	Juni 2013	Juli 2013
I	Tahap Persiapan :					
	1.Survei ke Perusahaan					
II	Tahap Pelaksanaan					
	1. Mengajukan Surat Pengantar Ke Perusahaan					
	2. Penelitian diperusahaan dan Pengambilan Data					
	3. Bimbingan Tugas Akhir					
III	Tahap Pelaporan :					
	1. Penyiapan Draft dan Persiapan Sidang					
	2. Revisi Sidang dan Penyerahan Tugas Akhir					